

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN
ADAT MANDAR DI KAB. POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT
(Studi Kasus tentang *Passorong*)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.Hi) Jurusan Peradilan Agama
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh

AHMAD DARWIS
NIM. 10100109002

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari, terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar,2014

Penyusun,

AHMAD DARWIS
NIM. 10100109002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan skripsi Saudara **Ahmad Darwis**, Nim. **10100109002** Mahasiswa jurusan Hukum Acara Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat; Studi Kasus tentang Passorong**" memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, ...12-03.....2015

Pembimbing I


Drs. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.
NIP. 19640601 199303 1 003

Pembimbing II


Dr. Supardin, M.Hi.
NIP. 19650302 199403 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat (Studi Kasus Tentang *Passorong*).", yang disusun oleh Ahmad Darwis, NIM: 10100109002, mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 M, bertepatan dengan 12 Jumadil Akhir 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 01 April 2015 M.
12 Jumadil Akhir 1436 H.

DEWAN PENGUJI

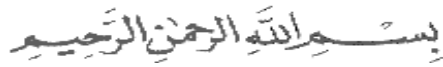
Ketua	: Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.
Sekretaris	: Dr. H. Abd. HalimTalli, M.Ag.
Munaqisy I	: Prof. Dr. Usman, M.Ag
Munaqisy II	: Dra. Hj. HartiniTahir, M.HI.
Pembimbing I	: Dr. H. M. SalehRidwan, M.Ag.
Pembimbing II	: Dr. Supardin, M.HI.

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Ali Parman, MA
NIP. 19570414 198603 1 003



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam atas izin dan limpahan rahmat-Nya berupa kesehatan dan kemampuan berfikir untuk berbuat kepada manusia, sehingga mampu melangsungkan tarap hidup dan membuat peradaban dunia di atas muka bumi serta mampu berpikir rasional, kritis, kreatif dan ulet dalam bertindak. Shalawat dan taslim atas kehariban Rasulullah Saw. atas akhlak mulia dan suri tauladan yang dimiliki, menjadikannya sebagai panutan bagi ummat manusia sebagai *rahmatan lil-alamin*.

Atas segala kerendahan hati, penulis menghadirkan karya ilmiah ini tentu masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi yang berminat pada tema kajian ini, yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat; Studi Kasus tentang *Passorong*”**. Penulis menyadari dengan sepenuh hati, selama mengikuti program perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sampai selesainya skripsi ini telah memperoleh banyak pelajaran tentang makna hidup berdampingan dalam dunia proses dan arti kebersamaan yang sesungguhnya, motivasi, semangat hidup untuk tetap melangkah

menggapai cita-cita serta bantuan dari berbagai pihak menjadi montir tersendiri bagi penulis. Ucapan terima kasih Penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., M.S. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Parman, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar.
3. Drs. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Drs. Supardin, M.Hi. selaku Pembimbing II penulis, di tengah kesibukan beliau tetap menerima Penulis untuk berkonsultasi.
4. Para Pembantu Dekan I, PD II, PD III, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan kepada penulis dalam proses penyelesaian studi.
5. Bapak H. Abd. Halim Talli, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Ibu A. Intan Cahyani, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berkonsultasi masalah nilai dan berbagai hal yang menyangkut masalah jurusan;
6. Kedua orang tuaku tercinta, Darwis dan A. Dahari yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayangnya tanpa adanya keluh kesah sedikit pun, serta seluruh keluargaku tercinta.

7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2009 maupun teman-teman dari fakultas dan universitas lainnya termasuk teman-teman KKN angkatan 48 yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih banyak atas partisipasinya semoga langkah kita selalu di ridhoi oleh sang Pencipta dan semoga kita dipertemukan kembali di lain waktu dan di lain tempat.
8. Rasa bangga dan terima kasih kepada segenap teman-teman di Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar (KPM-PM) dan Komunitas Pecinta Bahasa Arab Sulawesi Barat (KMPBA SULBAR) serta teman-teman di Pondok Harapan dan Pondok TOMAKAPPA' yang memberi warna tersendiri terhadap keseharian penulis.
9. Kepada semua pihak yang telah berjasa kepada penulis yang hanya karena keterbatasan ruang hingga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Akhirnya hanya kepada Allah swt. jualah penulis memohon agar mereka yang telah berjasa kepada Penulis diberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga Skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin

Makassar, 2014

P e n u l i s

AHMAD DARWIS
NIM. 10100109002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Defenisi Operasional.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian dan Sejarah Passorong	11
B. Hukum Passorong Perspektif Hukum Islam dan Adat Mandar.....	14
C. Kedudukan Passorong.....	15
D. Syarat-syarat Passorong	18
E. Kadar (jumlah) Mahar.....	19
F. Memberi Mahar dengan Kontan dan Utang.....	21
G. Macam-macam Mahar.....	22
H. Bentuk Passorong (Mas Kawin).....	23
I. Gugur/Rusaknya Mahar.....	23

BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Jenis dan Sumber Data.....	30
C. Metode Pendekatan	33
D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data	36
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Kota Makassar	38
B. Anak Jalanan di Kota Makassar	41
C. Identitas Responden	42
D. Karakteristik Latar Belakang dan Kehidupan Anak Jalanan Kota Makassar.....	46
E. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar terhadap Problematika Anak Jalanan (Aktivitas dan Prilakunya) di Kota Makassar.....	53
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR GAMBAR



ABSTRAK

Nama : AHMAD DARWIS
Nim : 10100109002
Fak/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum/ Peradilan Agama
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat; Studi Kasus tentang *Passorong*"

Judul dari skripsi ini adalah **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat; Studi Kasus tentang *Passorong*"**. Masalah yang menjadi fokus dari tulisan ini adalah Bagaimana konsep *passorong* dalam pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar di Kab. Polewali Mandar, serta tinjauan hukum Islamnya.

Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan teknik populasi dan sampel, Metode Pendekatan digunakan adalah pendekatan yuridis, sosiologis dan pendekatan syar'i. Pendekatan yuridis, yaitu penulis berpedoman pada dalil-dalil nash al-qur'an dan hadist Nabi saw, guna mendukung legalitas dari persoalan yang dibahas, dan Pendekatan sosiologis, yaitu mengetahui bagaimana kondisi di tengah-tengah kehidupan masyarakat dilihat dari sudut struktur dan dampak sosialnya. Serta Pendekatan syar'i, yaitu membahas masalah dengan memperhatikan ketentuan atau aturan yang ditetapkan dalam syari'at Islam, yaitu penulis berpedoman KHI. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi, serta metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah editing dan verifikasi.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dilaksanakan atas dasar perintah Allah swt. sesuai dengan aturan agama Islam untuk menjaga keluarga serta menentramkan suasana hidup masyarakat, juga memperluas hubungan yang lebih erat antara satu dengan lain dalam rangka menciptakan ketentraman hidup.

Agama Islam mengatur perkawinan bagi manusia demi ketentraman hidupnya di muka bumi ini, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. Ar-Rum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kaitannya dengan uraian di atas, bahwa pada umumnya setiap masyarakat pemeluk agama Islam, terlihat adanya pengaruh agama Islam terhadap ketentuan-ketentuan adat, termasuk ketentuan perkawinan. Perkawinan secara Islam juga memberikan peran yang begitu besar menentukan pada keluarga kerabat dan persekutuan seperti dalam perkawinan adat, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan prinsi-prinsip syariat. Itulah yang menjadi sebab sehingga kekuatan-kekuatan pikiran yang tradisional serta kekuasaan-kekuasaan tradisional dari para

kepala adat, dalam perkawinan harus pula memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, nikah menurut hukum Islam adalah merupakan suatu bagian seluruh upacara-upacara perkawinan. Salah satu diantaranya adalah tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan adat Mandar di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat, yang menitikberatkan pada studi kasus tentang *passorong*.

Sementara itu pada perspektif sejarah, didapati adanya tata susunan pemerintahan dan tata hukum yang teratur sudah ada di Indonesia, jauh sebelum penjajah menginjakkan kaki dan menanamkan kekuasaannya. Hal ini terlihat setelah diadakan *kodifikasi* dan *unifikasi* hukum, yang menunjukkan adanya aneka warna hukum yang berlaku.

Seperti yang kita ketahui, di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum. Dan hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum di Indonesia selain sistem hukum yang lain: hukum adat dan hukum Barat. Namun kedudukan hukum adatlah yang sangat diperhitungkan dan dihargai dalam pergaulan masyarakat.¹

Setelah dilihat dan diteliti secara seksama antara hukum Belanda dan hukum adat, terlihat bahwa kedudukan hukum adat sangat diperhitungkan dan dihargai dalam pergaulan masyarakat. Keberadaan hukum adat dalam pasal 11

AB (*Algemeene Bepalingen Van Watgeving Voor Indonesia*):

“Orang Indonesia asli golongan pribumi atau orang yang dipersamakan dengan mereka dapat tunduk secara sukarela kepada hukum perdata (hukum dagang Belanda) dan bagi mereka berlaku hukum agama serta

¹C. Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia; Suatu Pengantar* (Cet. II; Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 1.

*adat istiadat mereka asal saja tidak bertentangan dengan asas kepatuhan dan keadilan yang diakui oleh umum”.*²

Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat.³

Kenyataan di atas seiring dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Van Vollenhoven dengan membagi wilayah Indonesia ke dalam 19 buah lingkungan hukum adat. Dan Sulawesi Selatan menjadi daerah hukum adat yang kesebelas, dengan salah satu daerah hukumnya adalah daerah Mandar. Namun hasil penelitian ini hanya bersifat sementara.

Mandar yang lebih terkenal dengan istilah *Afdeling Mandar* pada masa penjajahan Belanda terbagi atas empat belas kerajaan. *Afdeling Mandar* memperlihatkan adat istiadat dengan corak warna tersendiri dalam hukum perkawinan. Termasuk di dalam pelaksanaan melamar, *fase* perkawinan dan penentuan besar kecilnya *passorong* (mas kawin) yang menjadi obyek penelitian ini.

Passorong (mas kawin) sering diartikan dengan mahar, dan bila dilihat dalam hukum Islam mempunyai arti seperangkat barang tertentu saja, seperti baju perang, atau seperangkat perhiasan emas. Tetapi *passorong* menurut hukum

²C. Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*, h. 2.

³Bushar Muhammad. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar* (Jakarta: Prandja Paramita, t.th.), h. 27.

perkawinan adat Mandar sekarang ini lebih luas karena mencakup seluruh pengorbanan pihak laki-laki dalam pelaksanaan tersebut.⁴ Pada mulanya *passorong* (maskawin) berkedudukan sebagai harga gadis calon istri atau pengganti si gadis terhadap orang tuanya yang telah diambil menjadi istri.

Di dalam hukum perkawinan adat Mandar diatur secara terperinci tentang *passorong* (maskawin) antara lain bentuknya, pembayarannya, besar kecilnya serta faktor stratifikat sosial calon istri yang mempengaruhi besarnya *passorong* (maskawin). Di samping itu terdapat juga *re'mo'-re'mo'* (suplemen maskawin) yang sangat berpengaruh atas kelancaran perkawinan, misalnya seperangkat alat shalat, perlengkapan mandi, kain, alat kecantikan, sepatu, dan lain-lain.

Hal-hal seperti di atas merupakan ciri khas bagi hukum adat Mandar dan sekaligus membedakannya dengan hukum adat yang lain. Sehingga jelas terlihat bahwa pengaturan tentang *passorong* (maskawin) dalam setiap hukum adat berbeda antara satu dengan yang lain.

Olehnya itu penulis dalam menyusun proposal ini mencoba mengangkat hal itu sebagai obyek kajian dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat; Studi Kasus tentang *Passorong*”.

B. Rumusan Masalah

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang lebih luas mengenai permasalahan yang akan dibahas, penulis merasa perlu untuk memberikan batasan

⁴BPS Kab. Polman (*Polman In Figures*), 2007.

atau ruang lingkup yang merupakan sasaran utama dari pembahasan yang akan diuraikan.

Adapun permasalahan yang akan dikaji untuk membatasi pembahasan, agar materi skripsi ini dapat lebih aktual dan berbobot ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *passorong* dalam pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar di Kab. Polewali Mandar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar di Kab. Polewali Mandar dalam kaitannya dengan *passorong* ?

C. Fokus Penelitian

Agar penyusunan karya tulis ini terarah dengan baik, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. Sesuai dengan objek penelitian maka batasan ruang lingkup yang ingin diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah penulis memfokuskan penelitian pada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat; Studi Kasus tentang *Passorong*”.

Adapun yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah, antara lain:

1. Lokasi

Penelitian masalah ini akan dilaksanakan di Kab. Polewali Mandar, mengingat lokasi ini adalah daerah yang dekat dengan tempat tinggal penulis yang memungkinkan penulis memperoleh data secara mudah dan dengan biaya yang murah.

2. Waktu Penelitian

Penulis akan mengadakan penelitian dalam jangka waktu satu bulan yang akan di mulai pada tanggal 18 Januari sampai dengan 18 Februari 2014. Waktu penelitian juga dapat dikondisikan sesuai dengan kebutuhan dan kendala yang terjadi di lapangan.

D. Defenisi Operasional

Guna menghindari pengertian yang keliru dalam memahami isi tulisan ini, maka penulis perlu mengemukakan pengertian judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat; Studi Kasus tentang *Passorong*”.

1. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.⁵ Hukum Islam mengatur segala hal dalam ritual keagamaan dan sosial bermasyarakat, termasuk perkawinan yang memiliki kekuatan hukum tersendiri.
2. Perkawinan Adat Mandar adalah proses penyatuan dua insan yaitu antara seorang pria dan wanita yang diikat dengan perjanjian yang suci untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga yang dilaksanakan dengan adat dan budaya Mandar, yang sejatinya berbeda dengan adat dan budaya di daerah lain.

⁵Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Cet. II: Padang Angkasa Raya, 1993) h. 18.

3. *Passorong* adalah pemberian oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang hendak dinikahi, yang dalam arti sempit yaitu seperangkat benda misalnya Al-Qur'an, alat shalat, pakaian dan perhiasan. Sementara dalam arti secara luas baik berupa uang atau barang yang menjadi pelengkap maskawin mulai pada saat prosesi lamaran sampai pada saat pernikahan.

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mendeskripsikan konsep pemberian *passorong* (mahar) dalam perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar sebagai upacara adat yang mempunyai fungsi sebagai syarat keabsahan suatu perkawinan dan mahar dalam Islam sebagai pemberian wajib.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap konsep pemberian *passorong* (mahar) dalam Perkawinan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Kegunaan.

- a. Memberikan sumbangan atau kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.
- b. Menambah khazanah literatur ilmiah keislaman, pengetahuan dan mengenai praktik mahar yang terjadi dalam perkawinan di masyarakat, khususnya bagi kalangan muslim di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

F. *Garis-Garis Besar Isi Skripsi*

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam lima bab, setiap bab terdiri sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta garis-garis besar isi skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian dan hukum *passorong* (mahar), syarat-syarat mahar, kadar mahar (jumlah mahar), memberi mahar dengan kontan dan utang, macam-macam mahar, bentuk mahar dan gugur/rusaknya mahar

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan pengolahan dan analisis data.

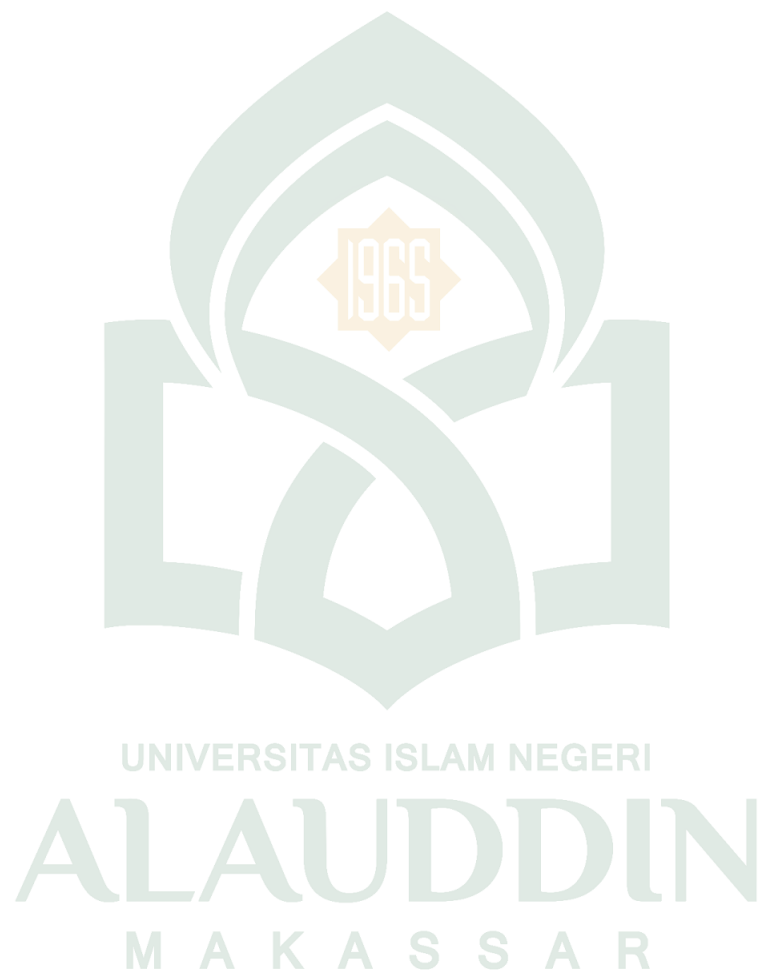
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum Kab. Polewali Mandar yang mencakup letak geografis, keadaan demografis, setelah itu diuraikan pula deskripsi data dan ulasan penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang membahas kesimpulan yang dapat ditarik dari bab-bab sebelumnya dan daftar kepustakaan yang penulis gunakan untuk memperkuat penelitian.

Bab ini berisi tentang dua hal yaitu simpulan yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang langsung diturunkan dari seksi diskusi dan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya, dan implikasi penelitian yang berisi tentang hasil dari kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi teoritis penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Sejarah Passorong

Passorong sering diartikan dengan mahar, dan bila dilihat dalam hukum islam mempunyai arti seperangkat barang tertentu saja, seperti baju perang atau seperangkat perhiasan emas. Tetapi pengertian menurut hukum perkawinan adat Mandar sekarang ini lebih luas karena mencakup seluruh pengorbanan pihak laki-laki dalam pelaksanaan perkawinan tersebut.

Menurut Wilken dalam sebuah bukunya yang disadur oleh Prof. Koencaraningrat dengan judul “Metode Antropologi”¹ bahwa pada mulanya *passorong* berkedudukan sebagai harga gadis calon istri atau pengganti si gadis terhadap orangtuanya yang telah diambil menjadi istri.

Sedangkan menurut Asaf A.A. Fyzee² bahwa kedudukan *passorong* dapat dilihat dalam dua tahap yakni:

1. Tahap Sebelum Agama Islam Berkembang

Pada masa ini terdapat dua kategori kedudukan *passorong* yakni; *Pertama*, sebagai pemberian terhadap yang tidak dibawa ke rumah (hanya dikunjungi), *passorong* berkedudukan sebagai harga mutlak istri, *kedua*, pemberian terhadap orang tuanya sebagai pengganti anak gadisnya.

¹ Koencaraningrat. *Metode Antropologi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1958), h. 665.

² Asaf A.A Fyzee. *Outlines of Muhammad Law*. Terj. Arifin Boy. *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Tirta Mas, 1965), h. 109.

2. Tahap setelah agama Islam berkembang

Setelah agama Islam berkembang dengan pesat dan ajarannya semaki luas, maka di dalam syaria Islam diterangkan sebagai perbaikan daripada kedudukan pada tahap pertama diatas. Dalam hal ini kedudukan *passorong* adalah milik istri sama halnya barang lain yang diberikan kepadanya.

Maksud diadakannya perbaikan pengertian diatas, adalah mengangkat drajat wanita, karena wanita bukan dibeli melainkan diambil sebagai pendamping dan sebagai ibu rumah tangga sementara laki-laki sebagai kepala rumah tangga.

Dalam istilah ahli fiqh, disamping perkataan “mahar” juga dipakai perkataan : “*shadaq, nihlah dan faridhah*” dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan mas kawin.³

Mahar, secara *etimologi*, artinya maskawin. Secara *terminologi*, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).⁴

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁵

Asaf A.A Fyzee juga mengatakan bahwa *passorong* atau mahar adalah:⁶

³Kamal Muhktar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 81.

⁴Lihat *Kamus Istilah Fiqh*, h. 184.

⁵Lihat Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (t.th.) h. 94.

“...pemberian pihak suami terhadap istri sehubungan dengan perkawinan ada dua jenis yakni; suami mengunjungi istri disebut sadaq dan mahar diberikan kepada orangtua istri. Dalam konsep Islam pengertian sadaq dan mahar adalah diperuntukkan kepada istri yang hanya berupa seperangkat alat tertentu seperti pakaian, perhiasan dan kitab suci Al-Qur’an”.

Passorong seperti yang dikemukakan oleh Atco Daeng Tjora mengemukakan *passorong* (maskawin) adalah sebagai berikut:

- a. Tanda ikatan perkawinan, yakni suatu pertanda bahwa keduanya telah berada dalam ikatan perkawinan.
- b. Tanda kesukaan dan kecintaan suami kepada istri.
- c. Tanda keikhlasan suami mengambilnya sebagai istri dan kerelaan istri untuk menjadi istri.
- d. Lambang tanggung jawab suami atas penghidupan kepada istri.
- e. Susuan (bekal) terhadap istri sekalipun suami nantinya meninggalkan istri”.

Jadi pengertian *passorong* (maskawin) menurut perkawinan adat Mandar dapat dibedakan atas dua bahagian. *Pertama*, pengertian secara sempit yakni seperangkat benda (berupa pakaian, perhiasan, perkakas sembahyang dan Al-Qur’an) yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan (istri) sebagai tanda kecintaan dan tanggung jawab suami terhadap istri yang diucapkan pada ijab Kabul, *sedangkan* pengertian secara luas adalah segala sesuatu baik berupa

⁶ Asaf A.A Fyze. *Outlines of Muhammad Law*. Terj. Arifin Boy. *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Tirta Mas, 1965), h. 109.

uang maupun re'mo-re'mo (pelengkap maskawin) yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan (istri) sejak acara *mettumae* (melamar) sampai pada acara pesta perkawinan.

B. *Hukum Passorong Perspektif Hukum Islam dan Adat Mandar*

Sorong atau maskawin adalah sesuatu yang memiliki nilai moral dan material yang mutlak ada dalam suatu perkawinan. Tanpa *sorong* atau maskawin perkawinan tidak sah, baik menurut adat maupun menurut syariat Islam.

Menurut K.H. Bakri Wahid, maskawin itu boleh berupa uang, emas atau tanah, yang seperti ini sudah sangat lazim di Sulawesi Barat baik sebelum Islam maupun sesudahnya.

Sedang menurut adat istiadat di Mandar, *sorong* adalah gambaran harga diri dan harkat martabat wanita yang ditetapkan menurut aturan adat yang disahkan oleh adat yang tidak boleh diganggu gugat atau ditawar-tawar tentang naik atau turunnya, *sorong* ini adalah milik si wanita yang harus diangkat (dibawakan) oleh si pria menurut strata wanita itu sendiri.

C. *Kedudukan Passorong*

Melihat uraian di atas, maka kedudukan *passorong* dapat diperinci dalam beberapa hal antara lain:

1. Dalam pertunangan

Dalam pertunangan ditentukan segala hal yang menyangkut kegiatan-kegiatan dalam tahap perkawinan berikutnya seperti *passorong* (maskawin), *mattanda jari* (bukti jadinya peminangan), pesta atau tidak dan sebagainya.

Bilamana delegasi pihak laki-laki ke rumah perempuan tidak dapat menyepakati banyaknya *passorong* dan suplemennya yang diminta oleh pihak perempuan, maka berakhirlah peminangan dengan hasil hampa yang berarti pula perkawinan batal.

2. Dalam ijab Kabul

Dalam hal ini, penyebutan jumlah *passorong* yang diberikan kepada istri sangat perlu agar orang yang hadir (masyarakat) mengetahui stratifikasi sosial istri. Disamping itu, hukumnya wajib dalam Islam serta menunjukkan nilai tanggung jawab suami dan keikhlasan suami mengambil pendamping istrinya dan kerelaan istri menerima apa yang diberikan kepadanya.

3. Dalam perkawinan (hidup rumah tangga)

Dalam hidup rumah tangga sebagai pasangan suami istri, maka masing-masing punya hak dan kewajiban. Dalam hubungan dengan *passorong* tersebut, kekuasaan atas hak ini harta bawaan kedalam arena rumah tangga yang telah diberikan orang lain kepadanya. Di samping itu *passorong* juga berudukan sebagai ikatan perkawinan, tanda kesukaan kepada istri, tanda pengikat istri, dan bukan pembeli istri.

4. Dalam perceraian

Sebagaimana diketahui bahwa *passorong* adalah hak mutlak istri, maka dalam perceraian, *passorong* tetap menjadi milik istri dan suami tidak berhak menuntutnya. Akan tetapi apabila perceraian terjadi dalam masa pengantin baru dan belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, maka *passorong* dan segala suplemennya dituntut oleh suami. Namun apabila istri yang

meminta cerai dengan alasan yang tepat misalnya impoten, maka *passorong* dan segala suplemennya tetap menjadi milik istri atau suami tidak berhak menuntutnya.

5. Dalam pewarisan

Dalam hal pewarisan, istri berhak mewariskan *passorongnya* kepada siapa saja yang dia kehendaki termasuk anaknya, keponakannya atau kepada orang lain.

Passorong ini merupakan susuan baginya dan anak-anaknya (penghidupannya), sehingga yang berkuasa penuh adalah dirinya dan anak-anaknya dan bukan suaminya, orang tuanya, atau mertuanya.

Dari uraian di atas dapat digambarkan bahwa kedudukan *passorong* (maskawin) adalah:

- a. Harta bawaan istri di dalam perkawinan
- b. Bukan harga istri atau penukar istri terhadap kedua orang tuanya.
- c. Pemberian kepada istri seperti pemberian orang lain terhadapnya
- d. Menentukan drajat (tingkat stratifikasi sosial) istri.

Passorong menurut syariat Islam dapat dilihat dalam sabda Rasulullah Saw dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya:

“ sesungguhnya Ali setelah menikah dengan Fatimah ia bermaksud mulai menggaulinya, Rasulullah SAW melarang sebelum ia memberikan sesuatu (maskawin). Maka berkatalah Ali kepada Rasulullah SAW saya tidak mempunyai apa-apa, jawab Rasulullah SAW kepada Ali berikanlah baju perangmu itu lantas Ali memberikannya kemudian didekatinya Fatimah sebagai suami mendekati istrinya” Hadits.

Pengertian di atas hanya menggambarkan bahwa tanpa *passorong* (maskawin), suami tidak dapat menggauli istrinya sebagaimana mestinya. Sebaliknya dalam hukum perkawinan adat Mandar keberadaan *passorong* (maskawin) sangat penting di samping syarat untuk menggauli istri juga dapat membatalkan pelaksanaan perkawinan.

Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan, dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberi maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya. Allah swt. Berfirman dalam QS. al-Nisa/4: 20

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا زَوْجَ مَكَاتٍ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا

مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتَنًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”⁷

⁷Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1989), h. 119.

Dalam ayat selanjutnya, Allah swt. berfirman QS. al-Nisa/4: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا
غَلِيظًا

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

D. Syarat-syarat Passorong

Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.⁸ Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Barang berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk

⁸Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 38.

memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁹

E. Kadar (jumlah) Mahar

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mas kawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi mas kawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.¹⁰

Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Mukhtar Kamal menyebutkan, “janganlah hendaknya ketidaksanggupan membayar mas kawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan,”

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar.

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, h. 103.

¹⁰ Kamal Muhktar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 82.

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat yang lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.

Pangkal silang pendapat ini, menurut Ibnu Rusydi, terjadi karena dua hal, yaitu:

- a. Ketidak jelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuan. Demikian itu, karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi, ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka hal itu mirip dengan ibadah.¹¹
- b. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mahfum hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan.

¹¹ Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, h. 88-89.

Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.¹²

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw., “nikahlah walaupun hanya dengan cincin besi” adalah dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena, jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya.¹³

F. Memberi Mahar dengan Kontan dan Utang

Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan utang sebagian. Kalau memang demikian, maka disunahkan membayar sebagian, berdasarkan sabda Nabi Saw yang artinya:

“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw melarang Ali menggauli Fatimah sampai memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: Saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya: Dimana baju besi Huthamiyyahmu? Lalu diberikanlah barang itu kepada Fatimah.”. (HR. Abu Dawud, Nasa’i dan dishahihkan oleh Hakim)

Hadis diatas menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang lebih baik, dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian terlebih dahulu.

Dalam hal penundaan pembayaran mahar (diutang) terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqih. Segolongan ahli fiqih berpendapat

¹²Al-Jaziri. *Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, Juz IV,

¹³Bandingkan dengan Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 14-15.

bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara diutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka manakala akan menggauli istri. Dan diantara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkannya hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkan. Demikian pendapat Imam Malik.

G. Macam-macam Mahar

Ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu:

1. Mahar *Musamma*

Mahar *Musamma*, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.¹⁴

2. Mahar *Mitsli* (Sepadan)

Mahar *Mitsli* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya. Bila terjadi demikian (mahar itu disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude), uwa perempuan (Jawa Tengah/Jawa Timur), ibu uwa (Jawa Banten), anak, perempuan, bibi/bude).

H. Bentuk *Passorong* (Mas Kawin)

¹⁴M. Abdul Mujid dkk. *Kamus Istilah Fikih*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 185.

Pada prinsipnya mas kawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibn Rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda sebab selain berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan. Namun, menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dan memilihnya, ini sangat kondisional. Artinya, dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suami.

I. Gugur/Rusaknya Mahar

Mahar yang rusak bisa terjadi karena barang itu sendiri atau karena sifat-sifat barang tersebut, seperti tidak diketahui atau sulit diserahkan, mahar yang rusak karena zatnya sendiri, yaitu seperti mahar yang rusak karena sulit dimiliki atau diketahui, pada dasarnya disamakan dengan jual beli yang mengandung lima persoalan pokok, yaitu:

1. Barangnya tidak boleh dimiliki;
2. Mahar digabungkan dengan jual beli;
3. Cacat pada mahar; dan
4. Persyaratan dalam mahar.

Dalam hal barangnya tidak boleh dimiliki seperti: khamar, babi, dan buah yang belum masak atau unta yang lepas, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akad nikahnya tetap sah apabila telah memenuhi mahar *mitsli*. Akan tetapi, Imam Malik berpendapat tentang dua riwayat yang berkenaan dengan persoalan ini. Pertama, akad nikahnya rusak dan harus dibatalkan (*fasakh*), baik sebelum

maupun sesudah dukhul. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Ubaid. Kedua, apabila telah dukhul, maka akad nikah menjadi tetap dan istri memperoleh mahar mitsli.

Mengenai penggabungan mahar dengan jual beli, ulama fikih berbeda pendapat seperti: jika pengantin perempuan memberikan hamba sahaya kepada pengantin laki-laki, kemudian pengantin laki-laki memberikan seribu dirham untuk membayar hamba dan sebagai mahar, tanpa menyebutkan mana yang sebagai harga dan mana yang sebagai mahar, maka Imam Malik dan Ibnul Qasim melarangnya, seperti juga Abu Saur. Akan tetapi Asyab dan Imam Abu Hanifah membolehkan, sedangkan Abu Ilah mengadakan pemisahan dengan mengatakan bahwa apabila dari jual beli tersebut masih terdapat kelebihan sebesar seperempat dinar ke atas, maka cara seperti itu dibolehkan.

Tentang penggabungan mahar dengan pemberian, ulama juga berselisih pendapat, misalnya dalam hal seseorang yang menikahi wanita dengan mensyaratkan bahwa pada mahar yang diberikannya terdapat pemberian untuk ayahnya (perempuan itu). Perselisihan itu terbagi dalam tiga pendapat.

Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan bahwa syarat tersebut dapat dibenarkan dan maharnya pun sah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar itu rusak, dan istrinya memperoleh mahar mitsli. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa apabila syarat itu dikemukakan ketika akad nikah, maka pemberian itu menjadi milik pihak perempuan, sedangkan apabila syarat itu dikemukakan setelah akad nikah, maka pemberiannya menjadi milik ayah.

Mengenai cacat yang terdapat pada mahar, ulama fiqih juga berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa akad nikah tetap terjadi. Kemudian, mereka berselisih pendapat dalam hal apakah harus diganti dengan harganya, atau dengan barang yang sebanding, atau juga mahar mitsli.

Imam Syafi'i terkadang menetapkan harganya dan terkadang menetapkan mahar mitsli. Imam Malik dalam satu pendapat menetapkan bahwa harus meminta harganya, dan pendapat lain minta barang yang sebanding. Sedangkan Abu Hasan Al-Lakhimi berkata, "Jika dikatakan, diminta harga terendahnya atau mahar mitsli, tentu lebih cepat. Adapun Suhnun mengatakan bahwa nikahnya batal.

Mengenai gugurnya mahar, suami bisa terlepas dari kewajiban untuk membayar mahar seluruhnya apabila perceraian sebelum persetubuhan datang dari pihak istri, misalnya istri keluar dari Islam, atau mem-fasakh karena suami miskin atau cacat, atau karena perempuan tersebut setelah dewasa menolak dinikahkan dengan suami yang dipilih oleh walinya. Bagi istri seperti ini, hak pasangan gugur karena ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu darinya.

Begitu juga mahar dapat gugur apabila istri, yang belum digauli, melepaskan maharnya atau menghibahkan padanya. Dalam hal seperti ini, gugurnya mahar karena perempuan sendiri yang menggugurkannya. Sedangkan mahar sepenuhnya berada dalam kekuasaan perempuan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan praktik pemberian *passorong* (mahar) dalam perkawinan khususnya masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar, serta data-data yang dari studi kepustakaan sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan, dan menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti yang bertujuan menggambarkan (menilai) permasalahan yang terjadi pada masyarakat seperti pengertian, dasar hukum, kedudukan, proses dan dampak dari pelaksanaan pelaku perkawinan.

C. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah orang yang telah melaksanakan prosesi perkawinan yaitu *passorong*, pemuka-pemuka adat, tokoh agama, pejabat pemerintahan, dan masyarakat lain yang paham tentang konsep pemberian *passorong* (mahar) dalam perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar.

D. Sumber Data Penelitian

Dilihat dari segi sumber perolehan data atau dari mana data tersebut berasal secara umum dalam penelitian dikenal ada dua jenis yaitu data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*) kedua jenis data ini selalu digunakan oleh para penulis dalam usaha membuat solusi atau menemukan jawaban terhadap pokok persoalan yang diteliti, baik digunakan secara bersama maupun secara terpisah.

Data primer adalah biasa disebut data mentah karena diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut barulah data tersebut memiliki arti.¹

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi seperti majalah, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Atas dasar konsep tersebut, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Observasi

Mardalis mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.² Observasi menggunakan segala apa

¹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 122.

²Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VIII; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 63.

yang bisa mendukung seperti mengamati dan mencatat setiap gejala-gejala yang terjadi dilapangan. Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif yang memberikan ruang yang luas bagi peneliti sebagai instrumen kunci untuk langsung mengadakan pengamatan dan pencatatan secara praktis tentang keadaan lapangan maupun hal-hal yang berhubungan dengan tesis ini dan memaparkan apa yang terjadi dilapangan sesuai interpretasi dari peneliti.

2. *Interview* (wawancara)

Sugiyono berpendapat, wawancara dapat dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam,³ benar dan akurat. Teknik wawancara dengan melakukan perolehan informasi dan data dari responden yang telah ditentukan sebelumnya dengan bertanya langsung dan merekamnya guna melengkapi tulisan tesis dan validitasi data. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai penelitian. Dalam sistematisasinya pertanyaan wawancara ada yang telah terstruktur dalam lembar pertanyaan yang akan dibawa oleh peneliti ke tempat penelitian dan ada juga yang tidak terstruktur yang berkembang sesuai dengan perbincangan antara peneliti dengan narasumber. .

3. Dokumentasi

Pada teknik dokumentasi, penulis akan membaca, mempelajari, mencatat dan mengumpulkan dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dan dibutuhkan oleh peneliti⁴dalam pembahasan tesis ini. Dokumen tersebut dapat berbentuk tulisan, gambar, rekaman, film dan sebagainya. dan arsip-arsip atau dokumen laporan

³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XII; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 317.

⁴Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya,1998), h.67.

kegiatan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini metode dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh keterangan yang

F. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah suatu alat yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Instrumen ini bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sementara itu, instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Kehadiran peneliti dalam sebuah penelitian kualitatif merupakan keharusan, mengingat data atau informasi yang telah dikumpulkan dari lapangan penelitian harus diambil. Dalam proses pengambilan data tersebut, kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak adanya, karena secara langsung ia mengetahui jenis data yang dikumpulkan.⁵

Dengan hadirnya peneliti di lokasi penelitian mempermudah proses pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti, sehingga ketika sampai pada proses analisis data, peneliti tidak mengalami kesulitan dalam memahami data yang ada. Selain itu, kehadiran peneliti di lapangan juga untuk mengumpulkan data, baik data yang bersifat primer maupun sekunder sehingga data telah terkumpul dan telah dianalisa.

Adapun instrumen-instrumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan salah satu instrumen penting dalam penelitian ini, guna menggali informasi secara mendalam dan akurat. Pedoman

⁵ Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 32.

wawancara ini bisa dalam bentuk terstruktur ataupun tidak terstruktur sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

2. Catatan Observasi

Catatan observasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi ketika melakukan pengamatan terhadap situasi, kondisi maupun gejala yang terjadi di lapangan selama penelitian berlangsung.

3. Acuan Dokumentasi

Dokumentasi penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber non-insani (bukan manusia). Dalam hal ini, dokumen berfungsi pula sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan tentang suatu peristiwa. Adapun dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang diambil dari objek penelitian sebagai pelengkap.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data adalah proses pengumpulan dan penyusunan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶ Analisis data mencakup banyak kegiatan yaitu: mengkategorikan data, mengatur data, memanipulasi data, menjumlahkan data, yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian. Analisis data bertujuan untuk meringkaskan data dalam bentuk yang

⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988), h. 103.

mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.⁷

Oleh karena pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, maka penerepan dalam menganalisis data lebih menggunakan data-data bukan rumusan seperti penelitian kuantitatif, sehingga dalam menganalisis data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder peneliti menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. Analisis deduktif, yaitu menganalisis masalah dari teori-teori umum atau aturan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baru kemudian disimpulkan secara spesifik.
2. Analisis induktif, yaitu menganalisis data dari praktik yang dilakukan oleh masyarakat yang berhubungan dengan kajian penelitian menjadi teori secara umum.⁸

Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan mencari dan menemukan keterkaitan antara data yang diperoleh di lapangan dengan kerangka teori yang ada dan yang dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini juga akan digunakan analisis model *Spradley*, yaitu melalui tahapan analisis domain (*domain analysis*), analisis taksonomi (*taxonomic analysis*), analisis komponensial (*componential analysis*), dan analisis tema kultural (*discovering cultural theme*).⁹

⁷Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 120.

⁸Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian*, h. 5.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 253.

Selanjutnya Spradley menjelaskan bahwa analisis domain merupakan langkah pertama dalam penelitian kualitatif. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek/penelitian atau situasi sosial. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih di permukaan namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti. Suatu domain adalah merupakan kategori budaya yang terdiri atas tiga elemen yaitu: *caver term*, *included terms*, dan *semantic relationship*. Langkah selanjutnya adalah analisis taksonomi yang aktivitasnya adalah mencari bagaimana domain yang dipilih itu dijabarkan menjadi lebih rinci. Selanjutnya analisis komponensial aktivitasnya adalah mencari perbedaan yang spesifik setiap rincian yang dihasilkan dari analisis taksonomi. Adapun langkah terakhir adalah analisis tema, yang aktivitasnya ialah mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungannya dengan keseluruhan selanjutnya dirumuskan dalam suatu tema penelitian.¹⁰

Teknik pengolahan dan analisis data ini akan dibagi dalam beberapa tahap, yaitu:

1. *Editing*

Editing: proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas dan informasi dikumpulkan oleh para pencari data. Lazimnya, *editing* dilakukan terhadap kuisioner. Melalui *editing* diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis.¹¹

Dalam editing biasanya mempunyai dua tahap. Scanning secara menyeluruh dengan memperhatikan ejaan tulisan dari segi penulisan kata dan pemilihan

¹⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 256.

¹¹ Amiruddin et al., *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.169.

diksi. Kemudian ada juga editing dengan tahap melihat kembali esensi yang diinginkan oleh penulis. Apakah yang disampaikan akan bisa difahami oleh pembaca. Editing sejatinya memerlukan kesabaran penuh karena ini lebih terfokus kepada kehati-hatian dalam meng-edit.

Amiruddin dalam Pengantar Metode Penelitian Hukum menjelaskan bahwa dalam editing biasanya akan diteliti kembali hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelengkapan pengisian terhadap semua pertanyaan
- b. Tulisan yang tertera harus dapat terbaca
- c. Kalimatnya harus jelas di makna, sehingga tidak menyebabkan kesalahan dalam menafsirkan
- d. Apakah jawaban-jawaban responden cukup logis dan terdapat kesesuaian antara jawaban yang satu dengan yang lainnya
- e. Jawaban harus relevan dengan pertanyaan¹²

2. Koding

Koding merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya. Aktivitas ini sudah memasuki tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.¹³

Sebagai contoh akan diajukan contoh jawaban dari satu pertanyaan yang berbunyi “Bagaimana pendapat anda tentang Pembelajaran Bahasa Arab di PIBA?” misalnya. Maka sudah barang tentu jawaban yang akan ditemukan

¹² Amiruddin et al., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.169.

¹³ Amiruddin et al., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.169.

akan beragam. Maksudnya, beragam dari segi redaksi tetapi mungkin dari segi makna akan ada yang sama.

3. *Tabulasi*

Pada tahap ini data dapat dianggap telah selesai di proses dan data yang ada siap “berbicara”. Bukan lagi sekedar data yang tidak dipahami maknanya.

H. *Pengujian Keabsahan Data*

Keabsahan data bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sudah sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dalam kenyataan atau tidak. Untuk memperoleh keabsahan data yang valid diperlukan pemeriksaan supaya diperoleh temuan-temuan dan informasi yang dapat digunakan antara lain:

1. Perpanjangan keikutsertaan.

Dengan adanya keikutsertaan peneliti dalam melaksanakan penelitian dapat memberikan kemungkinan meningkatnya mutu atau kualitas data yang dikumpulkan. Dengan cara ini pula, peneliti mampu menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang telah terjadi. Perpanjangan keikutsertaan peneliti di sini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan. Di samping itu, perpanjangan keikutsertaan itu bertujuan untuk memperluas ruang lingkup, menghindari *distorsi interspektif* yaitu terjadinya keseimbangan antara peneliti dengan data, dan menghindari *over action* atau aktivitas berlebihan.¹⁴

2. Triangulasi

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 176.

pemeriksaan dari sumber lainnya, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk membandingkan antara lain¹⁵:

- a. Data dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, hal ini dapat dicapai dengan jalan:
 - 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
 - 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
 - 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
 - 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
 - 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan.
- b. Dengan metode yang digunakan terdapat dua strategi, yaitu:
 - 1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data.
 - 2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
 - 3) Pemeriksaan sejawat, bertujuan untuk memperoleh kritikan dan pernyataan yang tajam atas hasil yang didapatkan sehingga dapat menuju ke tingkat kepercayaan dan kebenaran dari hasil penelitian.¹⁶

¹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 178.

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 175.

- 4) Kecukupan referensi, digunakan sebagai teknik yang mengharuskan peneliti untuk bisa menghasilkan data yang memuat segala informasi yang telah diperoleh di lapangan. Kegiatan ini biasanya mencakup transkrip wawancara, pengambilan gambar, pembuatan sket dan lain-lain.¹⁷
- c. Data dengan pengamatan, yaitu dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pada dasarnya penggunaan penelitian ini dapat dilihat dari segi membandingkan hasil pekerjaan seorang analis lainnya.
- d. Data dengan teori. Berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori.



¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 181.

BAB IV

PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT MANDAR

A. Selayang Pandang Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Sebelum dinamai Polewali Mandar - disingkat POLMAN, daerah ini bernama Polewali Mamasa- disingkat POLMAS yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah daerah ini dimekarkan, dengan berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten tersendiri, maka nama Polmas diganti menjadi Polman. Nama ini resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintah sejak tanggal 1 maret 2006, setelah ditetapkan dalam bentuk PP No. 74 tahun 2005 tanggal 27 Desember 2005, tentang perubahan nama Kabupaten Polewali Mandar.

Secara geografis, kabupaten ini terletak diantara $2^{\circ} 40' 00''$ $3^{\circ} 32' 00''$ Lintang selatan. Dan $118^{\circ} 40' 27''$ $119^{\circ} 32' 27''$ Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Mamasa di sebelah utara. Kabupaten Pinrang di sebelah Timur. Selat Makassar di sebelah selatan. Dan Kabupaten Majene di sebelah barat. Luas wilayah 2022.30 Km². Dan terbagi dalam 15 kecamatan, yaitu : Kecamatan Alu, Angreapi, Balanipa, Binuang, Campalagian, Limboro, Luyo, Mapilli, Matakali, Matangnga, Polewali, Tapango, Tinambung, Tuqbi Taramanu, dan Wonomulyo.

Daerah ini memiliki sejumlah kekhasan. Terutama kekayaan alam dan kebudayaan, yang berpotensi besar untuk memikat para pecinta *traveling*. Ada wisata bahari, wisata alam, wisata budaya, dan kerajinan yang tersebar hampir disemua kecamatan. Mulai dari wisata bahari kepulauan dan pesisir pantai yang sangat indah dan alami. Ditambah wisata pedalaman yang memiliki wisata tirta, wisata ritual dan

situs. Hingga wisata sosial dan politik , yang juga menawarkan sejuta keindahan kebudayaan dan alam yang eksotis.

Kalian akan pulang membawa sejuta kesan yang tak terlupakan. Begitu matahari terbit dari ujung timur, maka terhamparlah kilauan pasir putih di sepanjang pantai. Diselingi pandangan aktivitas para nelayan yang turun melaut atau pulang dari laut. Mulai dari kecamatan Binuang hingga Kecamatan Tinambung, akan terbentang panorama nan eksotis, menawarkan sejuta kedamaian. Sekaligus penegasan akan ketegaran para pelaut ulung Mandar. Menyusur samudra dengan *sandeq* (perahu bercadik khas Mandar).

B. Prosesi Perkawinan Dalam Tradisi Mandar

Perkawinan Adat Mandar dalam pelaksanaannya sama dengan praktek pernikahan yang ada pada umumnya. Mulai dari prosesi awal hingga akhir dengan mengikuti syarat pernikahan Islam untuk orang yang beragama Islam. Menyertakan wali, saksi, kedua mempelai, mahar dan ijab qabul serta penulisan atau pendataan oleh Kepala KUA setempat hanya saja, dalam perkawinan Adat Mandar terdapat bermacam ritual yang tidak ada dalam praktek perkawinan lainnya.

Perkawinan adat Mandar sudah ada dan menjadi tradisi yang dilaksanakan sejak dahulu, sebelum raja dan masyarakat Mandar sendiri memeluk agama Islam. Hingga sekarang, dalam tradisi perkawinan ada Mandar terus mengalami transformasi. Transformasi antara adat dan budaya serta syariat Islam merupakan sebuah corak yang mewarnai pernikahan Mandar hingga pada masa sekarang. Namanya juga beragam *siala*, *likka*, dan *nikka*.

Literatur penulisan sejarah dan segala yang berhubungan dengan perkawinan adat Mandar juga sangat variatif. Dalam mendeskripsikan praktek perkawinan, penulis

menemukan penggambarannya berbeda dengan apa yang digambarkan dengan pelaksanaan yang penulis temui ketika terjun sendiri ke dalam masyarakat Mandar di Kabupaten POLMAN. Ini disebabkan karena adanya pergeseran dari tatanan adat Mandar itu sendiri.

Pelaksanaan perkawinan secara umum dalam masyarakat Mandar POLMAN yang penulis temui di lapangan sekarang sudah mengalami transformasi signifikan dari prosesi pernikahan sebelumnya. Namun tetap menjadi hal yang unik karena mempunyai beberapa perbedaan mencolok utamanya dalam kajian kebudayaan dan penerapan hukum Islam. Pelaksanaannya meskipun telah mengalami transformasi tetapi unsur budaya masih sangat kental dan pengaruh Islam dalam budaya mandar sangat besar. Orang Mandar meyakini bahwa pelaksanaan perkawinan Adat merupakan suatu yang syar'i dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Walau di sisi yang lain unsur budaya dan kepercayaan pendahulu (nenek moyang) orang Mandar masih ditemukan dalam pelaksanaan perkawinan adat Mandar.¹

Perkawinan bagi masyarakat Mandar secara umum tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri untuk maksud membangun keturunan dan membina rumah tangga tetapi juga sebagai hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami didalamnya ada unsur ekonomi, social dan politik. Terjadinya perkawinan adat berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekeluargaan yang rukun dan damai antar kedua keluarga.² Sebab hal ini lembaga adat mengaturnya dengan cermat karena ini menyangkut hubungan baik antara dua keluarga besar.

¹Wawancara dengan KH. Bisri (Tokoh dan Ketua MUI POLMAN) pada tanggal 27 Mei 2014.

² Hilman Hadikusuma **Hukum Perkawinan Adat** (Bandung, Alumni Press: 1983) Hal. 76

Tatacara perkawinan adat Mandar merupakan rangkaian yang penuh tatakrama. Pengaturan atau tatacaranya diatur mulai dari pakaian atau busana yang digunakan, makanan yang disajikan, waktu pelaksanaan bahkan sampai kepada tahapan-tahapan pelaksanaan budaya perkawinan yang sangat sepele seperti ucapan yang harus dikeluarkan semuanya mengandung arti dan makna tersendiri.³

Selain jenis perkawinan ideal seperti yang dipaparkan sebelumnya, di kalangan masyarakat Mandar juga terdapat beberapa bentuk perkawinan lain yang secara pelaksanaan berbeda dengan perkawinan biasanya. Perkawinan ini bisa dikategorikan perkawinan yang nonformal karena tanpa peminangan dan dilaksanakan tidak sesuai dengan perkawinan Adat. Bahkan pelaksanaannya berlangsung karena melanggar adat itu sendiri dan ada juga yang melanggar hukum syara' (Agama). Seperti *sipaindongang*, *napaindongang*, *napipinguruang* atau *napinju'jurang alawena* dan *naottong* atau *diottong*.

Sipaindongang dalam arti bahasa “saling lari/ lari bersama”. Maksudnya, kedua sejoli sepakat untuk kabur dari rumah masing-masing dengan menetapkan waktu yang sama menuju rumah tetua adat atau penghulu untuk dilindungi dan dinikahkan. Sedangkan *napaindongang* secara harfiah bisa diartikan “dilarikan” yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki membawa kabur anak gadis orang kepada penghulu atau tetua adat untuk di nikahi dengan secara paksa. *Napipinguruang alawena* adalah sebaliknya. Dimana yang memaksa untuk menikah adalah perempuan dengan datang ke rumah laki-laki untuk memaksa pihak laki-laki menikahinya secara harfiah, *napipinguruang alawena* bisa diartikan menjebloskan diri sendiri. *Naottong* adalah bentuk terakhir yaitu pernikahan dengan sebab hamil sebelum nikah.

Pernikahan yang terakhir ini dalam tradisi Mandar merupakan pernikahan yang paling tercela dan kadang berakhir dengan taruhan nyawa.

Faktor-faktor pernikahan di luar adat tersebut terjadi oleh beberapa sebab seperti tidak diterimanya peminangan atau lamaran keluarga laki-laki oleh keluarga perempuan. Juga terkadang karena kedua pasangan yang saling dimabuk cinta tidak mampu melaksanakan pernikahan secara adat lantaran biaya yang begitu mahal dalam pemberian *passorong*’ sehingga berfikir dari melakukan perzinahan lebih baik menyalahi adat dengan menempuh pernikahan nonformal meskipun hal tersebut merupakan sebuah aib.⁴ Ada juga yang menganggap pernikahan tanpa embel-embel seperti itu adalah pernikahan islami di mana sandaran hadits rasul "menikahlah meski dengan cincin besi"⁵ dan kisah tentang sahabat "menikah dengan mahar surah al ikhlas"⁶ menjadi landasan mereka melanggar adat.

Dengan alasan *siri*’ ini sebenarnya mengapa konteks perkawinan bagi masyarakat Mandar sangat berbeda dan sangat sakral. Dalam prosesi perkawinan adat masyarakat Mandar harus melewati beberapa tahapan. Tahapan tersebut tidak dimaksudkan untuk memperlambat atau mempersulit akan tetapi dalam pernikahan tersebut diharapkan kedua calon mempelai dan masyarakat Mandar merasakan esensi dari sebuah pernikahan yang ditandai dengan perjuangan dan kerja keras dari segenap golongan keluarga tetangga dan karib-kerabat. Hingga sangat terasa bagaimana peralihan sebuah fase kehidupan itu benar ada dalam perkawinan. Bukan sekedar pembolehan untuk saling berhubungan seks tetapi juga sebagai acuan untuk hidup

⁴ Wawancara dengan Abd. Rahman (Staf KUA Balanipa) Pada tanggal 28 Mei 2014.

⁵ HR Bukhari Muslim

⁶ HR Bukhari Muslim

langgeng sebab pelaksanaannya sangat sakral dan penuh dengan pengorbanan berbagai pihak.

Adapun tata urutan dan tahapan dimaksud, dalam uraian singkatnya sebagai berikut :

Tahap Pertama : Naindo nawa-nawana (jatuh hati).

Zaman dulu jatuh hati dimaksudkan pada anak laki-laki tetapi pada orang tua, karena dulu anak hanya mengikuti pilihan orang tua. Anak laki-laki jarang melihat gadis-gadis usia nikah karena dipingit. Sekarang hak jatuh hati dilakukan sang anak laki-laki, kemudian melaporkan ke orang tuanya.

Tahap Kedua : Mambalaqbaq (Rencana penentuan calon)

Musyawarah rumpun keluarga untuk memilih dan menetapkan seorang calon bagi anak laki-laki. Pada zaman dulu anak tidak dimintai pertimbangan, mutlak menerima. Tetapi sekarang setelah mendapatkan pengaruh ajaran Islam, persetujuan anak juga sangat menentukan calon.

Pemilihan jodoh bagi orang Mandar, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, selalu berpatokan kepada empat segi yang dapat menciptakan kerjama sama yang baik dan langgeng antara suami istri demi terwujudnya keluarga sejahtera, dan mendapat ridho dari Allah SWT. Dalam istilah mandar disebut *appe sulapa dimesanna namala makke'deang siwali parri ilalang pamboyangang salama' salewangang mannannungang lino akhera*.

Keempat segi itu adalah:

a. *Tomapia* dan *tomala'bi*

Tomapia adalah orang yang berbudi pekerti luhur. Sedangkan *tomala'bi* adalah bangsawan yang berbudi pekerti luhur. Pada dasarnya, kehidupan

rumah tangga itu merupakan wadah terciptanya kerjasama antar suami istri, demi terwujudnya kesejahteraan hidup dalam berumah tangga. Karna itu budi pekerti luhur menjadi salah satu pilihan utama dalam memilih jodoh, baik laki-laki maupun perempuan.

b. Status ekonomi

Penilaian selanjutnya adalah status ekonomi. Aktivitas dan pengetahuan seseorang dapat diketahui dari status ekonominya. Semakin aktif seseorang dalam lapangan pekerjaannya, maka semakin baik pula status ekonominya. Dan semakin dalam pengetahuan seseorang, maka semakin mudah ia mendapatkan pekerjaan, sehingga status ekonominya akan membaik.

c. Faktor keturunan

Ini faktor yang paling mendasar dalam memilih jodo, karena masalah nikka sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan hukum *ada' pura onro* yang bersumber dari atuang (strata sosial dalam masyarakat).

d. Faktor hubungan darah

Memilih jodoh berdasarkan hubungan darah atau dari kalangan keluarga sendiri, sangat mempermudah terlaksananya proses pernikahan. Dalam istilah Mandar disebut *tomesa ponge' totammala sipittuleang rumbu apinna*. Untuk mengetahui apakah seorang gadis atau seorang pemuda memiliki salah satu dari *appe'sulapa'* tersebut di atas, biasanya dapat diamati pada waktu dan tempat berlangsungnya kegiatan kemasyarakatan yang bersifat mempersiapkan dan menyelenggarakan upacara-upacara adat. Pada saat itu, masyarakat sekitarnya, bahkan para kerabat yang bermukim di daerah lain akan berdatangan. Disinilah bisa terjalin suatu

hubungan, dimana para pemuda dan pemudi yang juga hadir, bisa saling mengamati, tentang kerajinan, aktifitas keseharian, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan budi pekerti masing-masing.

Tahap Ketiga : Messisiq (Menyampaikan keinginan)

Utusan keluarga laki-laki menanyakan “*Mettuleq dimawayanna tangngalalang*” (apakah jalan tidak beronak duri). Maksudnya apakah sang putri belum ada yang menyimpan. Jika jawabannya belum, maka lamaran dilanjutkan. Tetapi jika jawabannya sudah, maka lamaran dihentikan lalu mencari calon alternatif lainnya.

Tahap Keempat : mettumae (melamar)

Upacara kunjungan resmi rumpun keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan untuk melakukan pelamaran, sambil menanyakan jumlah belanja, dan segala sesuatunya, kecuali mahar. Pembicaraan ini belum final, karena biasanya akan dimusyawarahkan lagi oleh kedua belah pihak dengan keluarganya.

Tahap Kelima : mattanda jari (penentuan jadi atau tidak)

Pertemuan dan musyawarah resmi di rumah perempuan untuk menentukan jadi atau tidaknya pertunangan, sekaligus meresmikannya jika kata mufakat.

Tahap Keenam : mappande manuq (menabur perhatian)

Sejak resminya pertunangan, pihak laki-laki harus memperhatikan tunangannya yang dilakukan oleh orang tua laki-laki, yaitu member sesuatu pada situasi tertentu, misalnya pada hari lebaran, masuk puasa, dan sebagainya.

Tahap Ketujuh : mattanda Allo (menentukan hari)

Musyawarah menentukan kepastian hari pelaksanaan pernikahan.

Tahap Kedelapan : maccanring (membawakan mahar)

Mengantar bahan yang akan dipergunakan dalam pesta pernikahan kepada pihak perempuan, termasuk hal-hal yang telah menjadi persetujuan. Acara ini dilakukan semeriah mungkin, diikuti oleh rumpun keluarga dan handai taulan. Tata cara membawakan bawaan memiliki aturan tertentu menurut tradisi.

Tahap Kesembilan : *mappaduqpa* (pemberian sebagai bukti)

Pemberian satu pasang pakaian lengkap kepada mempelai laki-laki dari mempelai perempuan yang diantar oleh keluarganya. Pakaian itulah yang akan dipakai mempelai laki-laki pada saat acara perkawinan berlangsung.

Tahap Kesepuluh : *maqlolang* (berkunjung)

Kunjungan resmi calon mempelai laki-laki bersama kerabatnya kerumah perempuan, melakukan ramah tamah antara dua keluarga. Acara ini paling sempurna diadakan mulai tujuh atau tiga hari sebelum perkawinan. Atau bisa satu kali saja pada malam akan dilaksanakan perkawinan.

Tahap Kesebelas : *mellattigi* (mappacci)

Upacara pemberian pacar pada kedua mempelai oleh para anak pattola Adaq secara tersusung menurut level sosial setempat, yang diawali oleh qhadi setempat. Upacara ini berlaku bagi setiap keluarga pengantin, meski Zaman dulu hanya bagi bangsawan Hadat atau Raja.

Tahap Keduabelas : *metindor* (mengantar)

Setelah melangsung acara pallattigiang pada malam hari, esok harinya pihak mempelai laki-laki mempersiapkan arak-arakan rumpun keluarga berpakaian adat mengantar mempelai laki-laki kerumah mempelai perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Arak-arakan tersebut terdiri dari beberapa bagian, di antaranya sebagai berikut:

- a. Seorang perempuan tua berpakaian baju *book*, *lipa' sa'be* berjalan di depan dengan membawa sebuah botol berisi minyak kelapa.
- b. Seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, berpakaian kemeja putih lengan panjang, sarung sutra Mandar, dan kopiah di kepala. Membawa *pa'inda sorong*, yang terdiri dari :
 1. Sepintal benang, yang bermakna agar cinta kasih kedua mempelai ibarat pintalannya.
 2. Setangkai *bangun tuwo*, bermakna cinta kasih kedua mempelai tetap abadi.
Pa'indo sorong diletakkan dalam satu wadah berupa *stand cup* besar dari keramik atau gerabah, dipangku dalam kain putih yang dililitkan keleher pembawanya.
 3. Beberapa orang gadis membawa beberapa buah *kappu* (kotak bundar terbuat dari kayu atau kuningan) berisi buah-buahan.
 4. Dua orang pemuda atau lebih, masing-masing membawa *masi-masigi* (maket masjid)
 5. Beberapa orang gadis membawa *sitto*, yaitu kotak segi empat yang terbuat dari karton dan pada masing-masing seginya dibuat hiasan. Masing-masing *sitto* berisi amplop yang didalamnya berisi uang *bua loa*, *batu cinna*, *batu pallembar*, *pappoppong*, *pambuai pa'leko*, dan *pallendassi kawari'*.
 6. Satu orang laki-laki berpakaian adat membawa peti kecil berisi mahar/*sorong* berjalan seiring dengan pengantin laki-laki yang didampingi oleh dua orang anak kecil sebagai pendamping pengantin.

7. Dibelakang pengantin terdapat beberapa orang pemain musik rebana tradisional.
8. Dibelakang pemain musik rebana tradisional, terdapat beberapa orang perempuan dan beberapa orang laki-laki sebagai *petindor*.

Tahap Ketigabelas : nikkah/likka/kaweng (nikah/kawin)

Setelah arak-arakan mempelai laki-laki sampai di rumah mempelai perempuan, dan dipersilahkan duduk di atas pelaminan bersama pendampingnya, serta para *petindor* (pengantar) duduk rapi di atas rumah, maka dilaksanakanlah kegiatan rangkaian pernikahan. Orang tua pengantin perempuan menghadap kepada kadhi atau imam dan menyerahkan anaknya untuk dinikahkan “ *uwakke’ langi’ mating ana’u pakawengana’ lao di tommuane di sannga i....* (nama pengantin laki-laki)”

Kadhi atau imam menerimanya. Lalu membacakan khotbah nikah, selanjutnya kadhi atau imam menempelkan ibu jari kanannya kepada ibu jari kanan pengantin laki-laki sambil menyebutkan nama pengantin laki-laki dan berucap “*upakaweno’o lao di towaine disanga i....* (nama pengantin perempuan) *pura nawakkelani le’mai diiyau, musoroni* (menyebut mahar). Diikuti oleh ucapan-ucapan pengantin laki-laki “*utarimai akawenganna i....* (nama pengantin perempuan) *usorongi* (menyebut mahar yang telah disampaikan oleh kadhi atau imam). Selanjutnya salah seorang keluarga pengantin laki-laki, menuntun pengantin laki-laki masuk kedalam kamar untuk berjabat tangan (*mendonggo*) dengan pengantin perempuan. Setelah itu, kedua pengantin dibawa kepelaminan duduk berdampingan untuk mendengarkan *Ta’lik Talak*. Dengan selesainya *ta’lik talak*, maka selesailah acara nikah. Kemudian kedua mempelai mendatangi keluarga kedua belah pihak untuk berjabat tangan, selanjutnya

kedua mempelai kembali duduk di atas pelaminan. Dan dilaksanakanlah perjamuan kepada tamu-tamu yang hadir. Selasai perjamuan, seluruh tamu-tamu dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan meninggalkan rumah pengantin.

Tahap Keempatbelas : *mappiqdei sulo* (meniup obor)

Satu tradisi yang tidak dapat dilalaikan, melalui sejumlah pintu mempelai laki-laki menemui istrinya di kamar untuk bersalaman (*pambuai baqba dan pambuai boco*'), maka setelah keluar kamar, mempelai laki-laki diwajibkan untuk meniup obor yang menyala. Syaratnya menurut tradisi Mandar, sekali tiup api harus padam. **Tidak jelas apa maknanya.**

Tahap Kelimabelas : *maqande ande kaweng* (mencicipi makanan kawin)

Acara makan makanan pengantin *meppiqli sulung* yang dilaksanakan kedua mempelai, diramaikan handai taulan. Biasanya yang ada dalam hidangan acara ini adalah kue-kue khas daerah setempat yang memiliki makna tersendiri, seperti *cucur, loka tiraq* (pisang ambon) dan lainnya.

Tahap Keenambelas : *siuleq/mangino* (berlari/bermain)

Acara gembira di malam pengantin untuk menghormati tamu, baik di rumah mempelai perempuan maupun di rumah mempelai laki-laki pada saat *marola*. Biasanya mempelai perempuan dengan menutup muka malu-malu, tampil ditengah hadirin diikuti mempelai laki-laki yang merayu dan mengililinginya.

Tahap Ketujuhbelas : *marola* (berkunjung ke rumah mertua laki-laki)

Kunjungan mempelai perempuan dan keluarganya ke rumah laki-laki membawa beragam kue tradisional, dan sebaliknya keluarga laki-laki membalasnya dengan kue kepada keluarga mempelai perempuan.

Tahap Kedelapanbelas : baru (pengantin baru)

Suatu tradisi pengantin Mandar zaman dulu, kadang bertahun-tahun atau setidaknya berbulan-bulan, perempuan baru bisa berbaikan nyata pada suami. Masa tersebut adalah masa bertahan bagi istri untuk tidak cepat menyerahkan mahkotanya, untuk tidak dianggap wanita murahan.

Tahap Kesembilanbelas : *mallipo' ku'bur* (ziarah kubur)

Masih dalam suasana pengantin baru, kedua mempelai bersama kerabat keluarganya berziarah ke kuburan keluarga (jika yang meninggal salah satu orang tuanya, dan keluarga lainnya).

Tahap Keduapuluh : *mallipo'ana'* (keluarga)

Karena masih pengantin baru, pihak laki-laki harus membesuk kedua mempelai, yang biasanya masih berada di rumah orang tua mempelai perempuan. Mengantarkan berbagai kebutuhan sehari-hari menantunya.

Seluruh rangkaian proses upacara di atas, terangkai dalam perkawinan tradisi masyarakat Mandar. Salah satu yang mutlak dalam rangkaian acara itu adalah penyerahan *sorong* (mahar), sebab tanpa mahar perkawinan tidak mungkin terjadi, kecuali seorang budak diperistrikan tuannya (*mappissawei pikelluqna/saeyyanna*). Itulah sebabnya sehingga ada ungkapan yang mutawatir diseluruh Mandar yang mengatakan : *da mualai pennannaranna anaq tandi sorong''* (jangan kembangbiakan anak yang lahir tanpa maskawin).

C. *Passorong* dalam Perkawinan Adat Mandar

Pernikahan adat Mandar hampir sama dengan pernikahan adat pada suku-suku lainnya yang ada di Sulawesi dalam hal pemberian *passorong*. Hal itu dapat dilihat pada pelaksanaan pernikahan yang sering mejadikan *passorong* sebagai hal yang paling penting terhadap terlaksananya pernikahan. Faktor strata sosial (kasta) menjadi pemicu utama besar tidaknya *passorong* yang diberikan kemudian disusul jabatan, harta, pendidikan dan tingkat religiusitas.⁷

Tingkatan besaran *passorong* yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ditentukan oleh strata social (*atauang*) di antaranya sebagai berikut:

1. **Ana' Puang Pattola Mara'diah**, adalah lapisan social tinggi lapisan social ini disebut juga anak bangsawan tinggi yang berhak menjabat sebagai raja (*mara'diah*) pada zaman dahulu. Nilai *sorong*-nya atau maharnya 360 real. Pernikahan diantara sesamanya disebut *passambo anna' kappar*. Pernikahan antara ana' *pattola mara'dia* dengan ana' *pattola' ada'* disebut *tappa dibaku-baku'*. Jika anak laki-laki ana' *pattola mara'diah* atau ana' *pattola ada'* menikah dengan golongan *batua* disebut "*pappissawei pikellu'na*".
2. **Ana'puang pattola ada'**, adalah anak bangsawan yang berhak menduduki jabatan dalam struktur adat kerajaan. Nilai *sorong*-nya atau maharnya 180 real.
3. **Topia**, adalah orang merdeka dan mempunyai hubungan kekerabatan dengan bangsawan *mara'diah* atau bangsawan adat. Nilai *sorong*-nya atau maharnya 90 real.

⁷ Wawancara dengan Hendra (Budayawan Mandar) pada tanggal 25 Mei 2014

4. **Tosamar**, adalah orang merdeka, tetapi tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kaum bangsawan *mara'diah* atau bangsawan adat. Nilai *sorong*-nya 60 real.
5. **Batua**, adalah golongan budak dan nilai *sorong*-nya atau maharnya tidak boleh lebih dari 40 real.

Dari penelitian penulis, penulis memberikan sebuah analisa bahwa tujuan dari *dui' menre* dalam acara perkawinan adat Mandar di Kabupaten POLMAN adalah sebuah bentuk penghargaan. Baik itu untuk diri keluarga mempelai laki-laki maupun keluarga mempelai perempuan.

Masyarakat Mandar di Kabupaten POLMAN menganggap penting upacara perkawinan. Mengsakralkannya. Bahkan sebahagian bisa dikata menjadikan sebuah fase hidup yang tidak boleh tidak diadakan secara meriah. Mereka akan bangga apabila perkawinan tersebut dihadiri oleh orang banyak dan pejabat-pejabat tinggi. Mereka merasa malu apabila melaksanakan upacara tersebut dengan sederhana apalagi jika meninggalkannya.

Penerapan *passorong* pada masyarakat Mandar di Kabupaten POLMAN biasanya dilakukan dengan pembayaran secara kontan karena merupakan hal yang harus menurut sebahagian orang harus dihabiskan dalam prosesi acara. Tetapi ada juga yang tidak secara kontan tetapi membayar separuh dan separuhnya lagi diberikan saat acara resepsi perkawinan berlangsung bahkan ada yang menyerahkannya setelah selesai acara perkawinan. Walaupun prosesi yang terakhir ini dianggap aib bagi kalangan orang Mandar dan biasanya tidak di umumkan pada khalayak umum hanya dalam lingkup kedua keluarga saja.

Namun, sepenuhnya harus difahami dari awal bahwa *passorong* dalam tradisi masyarakat Mandar POLMAN adalah hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Sehingga pelaksanaannya juga adalah berdasarkan dari kesepakatan yang telah ditetapkan oleh kedua keluarga yang akan mengsukseskan acara perkawinan.

Pembahasan tentang nominal berapa *passorong* dalam perkawinan adat Mandar di Kabupaten POLMAN merupakan pembahsan yang urgen karena menyangkut kesuksesan acara perkawinan. Bisa dikatakan *passorong*lah jantung dari perkawinan adat Mandar. Karena adanya *passorong* maka pelaksanaan perkawinan bisa meriah dan mewah.

Nominal tertinggi dari hasil wawancara yang penulis terima dilapangan sejumlah 1 M. dan yang paling sedikit untuk sekarang adalah 10 juta. Rata-rata kisaran *passorong* bagi mayoritas masyarakat Mandar di Kabupaten POLMAN berkisar dalam nominal 20-hingga 50 juta. Sebahagian diantaranya menambahkan dengan harta yang tidak bergerak seperti tanah ataupun sawah.

Penentuan nominal *passorong* bagi sebahagian besar masyarakat Mandar POLMAN sangat tergantung pada hierarki kebangsawanan. Pendidikan. Keturunan. Dalam artian ketika dia merupakan anak tunggal pewaris harta maka akan lebih mahal daripada yang biasanya. Dan juga ada yang berdasarkan kecantikan. Ada juga, meskipun tidak banyak, yang menjadikan *passorong* mahal bagi pihak laki-laki itu ketika pihak laki-laki meminang perempuan yang masih memiliki saudara yang lebih tua dan belum menikah. Maka, bagi pihak laki-laki tadi akan dibebani *passorong* yang lebih mahal karena *passorong* tersebut akan diberikan sebahagian untuk saudara yang lebih tua dan belum menikah. Sang kakak akan dibiarkan meraup semampunya

uang dari yang telah diberikan oleh mempelai laki-laki. Seberapapun nominal yang mampu ia genggam dalam tangannya maka itu menjadi milik sang kakak. Selebihnyalah yang dipakai sebagai *passorong* untuk kepentingan acara perkawinan.

Nominal yang dibawa biasanya diumumkan dalam acara akad nikah akan tetapi kebanyakan tidak diumumkan pada akad nikah hanya pada waktu *mapparai doi*. Hanya saja nominal tersebut akan tersebar dengan sendirinya dikalangan masyarakat dan akan nampak dari mewahnya pesta serta tamu-tamu yang hadir dalam acara tersebut.

Menurut penelitian yang penulis temukan dilapangan, ternyata, pengumuman *passorong* ternyata yang sampai pada khalayak banyak berbeda dengan apa yang sebenarnya diputuskan oleh kedua belah pihak. Ada motif seperti, ketika *passorong* yang diumumkan 50 juta misalnya ternyata yang sebenarnya tidak seperti itu. Hanya 30 juta misalnya. Hanya menginginkan penghargaan dan prastise saja hingga kemudian melakukan kebohongan publik. Sama juga dengan motif yang kedua yaitu 50 juta. Akan tetapi ternyata yang dibawah oleh mempelai laki-laki hanya 30 sedangkan yang 20 sisanya adalah pemeberian pihak perempuan. Ini sedikit lebih baik dari yang pertama. Hanya juga akan menjadi sebuah pertanyaan besar bahwa apa salahnya jika terbuka saja. Tidak usah ditutup-tutupi.

Masyarakat Mandar memahami bahwa perkawinan adalah sebuah alat untuk memperluas lingkaran kekerabatan atau kekeluargaan serta juga kadang menjadi penyelesaian sebuah permasalahan.

Dalam kehidupan, memang tidak bisa dipungkiri bahwa dorongan sexualitas bisa menjadi alasan yang sangat penting untuk sebuah ikatan perkawinan. Tetapi bagi

orang Mandar meyakini lebih dari sekedar pelampiasan sex semata. Faktor pendorong lain seperti memperkuat ekonomi, memperoleh kedudukan sosial juga mewarnai perkawinan adat Mandar di kabupaten POLMAN. Hal tersebut bisa ditelusuri dari pemberian *passorong* dalam sebuah acara perkawinan. Diantara motifnya adalah motif ekonomi.

Sistem perkawinan orang Mandar di Kabupaten POLMAN sesungguhnya tidak bisa terlepas dari faktor ekonomi yang turut ikut serta mewarnai perkawinan tersebut. Misalnya kasus tentang diterimanya seorang mempelai dikarenakan pertimbangan kekayaan itu telah lumrah diketahui. Juga pertimbangan pekerjaan yang selalu dipertanyakan ketika acara lamaran dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki. Misalnya ketika seorang perempuan sudah mempunyai kerja atau sudah terangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka akan menjadikan pekerjaan tadi sebagai motif untuk tingginya nominal *passorong* dan juga menjadikannya sebagai cita-cita sebahagian laki-laki untuk mencari perempuan yang telah mendapatkan pekerjaan yang mapan untuk kepentingan ekonomi.

Motif lain selain motif ekonomi adalah motif politik. Adakalanya *passorong* dalam perkawinan adat Mandar mengandung motif politik seperti cerita tentang bagaimana keluarga raja-raja POLMAN menikahkan anak mereka dengan syarat *passorong* yang tinggi ataupun sayembara dengan kepentingan negara. Juga untuk memperkuat kekerabatan diadakan pertunangan dengan raja lain.

Contoh lain dari motif politik juga bisa kita lihat dari bagaimana sebahagian masyarakat Mandar di Kabupaten POLMAN menganggap *passorong* bisa menjadi simbol penolakan secara halus terhadap mempelai laki-laki yang datang melamar.

Masyarakat Mandar POLMAN ketika tidak mampu mengatakan tidak untuk menolak biasanya menggunakan cara yang halus dengan meninggikan biaya *passorong* tanpa ditawarkan sehingga pihak mempelai laki-laki mundur secara perlahan dan memahami bahwa tiada lain permintaan pihak perempuan diluar batas kemampuannya adalah bentuk penolakan secara halus.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap *Passorong* dalam Perkawinan Adat Mandar

Dalam tinjauan hukum islam, pemberian mahar ini merupakan hal yang sah-sah saja adanya. Tidak ada yang bertentangan dengan al-Quran maupun Hadits secara langsung. Bahkan konsep *al Urf* kadang menjadi justifikasi atas keberadaannya dengan berdalil kaedah fiqh

العادة المحكمة

Terjemahnya:

"adat bisa menjadi landasan hukum"

atau kaedah yang mengatakan

الاصل في الاشياء الاباحة

Terjemahnya:

"dasar dari segala sesuatu itu hukumnya boleh" ⁸

⁸Abdul Karim Zaidan *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, Vol IIX (Muassasah ar- Rusalah, 2011), hal 155

Hal ini juga bisa dijelaskan dari landasan berfikir bahwa penetapan hukum pada zaman Rasul juga banyak yang diambil dari adat istiadat masyarakat Arab pra Islam yang kemudian mendapat ketentuan hukum dalam Islam. Seperti tradisi luar Arab yang ditetapkan dalam al-Qur'an adalah ibadah haji, puasa, kewarisan, bentuk-bentuk perdagangan (jual beli), *khitanan* dan kurban.⁹

Selain itu, sistem perkawinan adat masyarakat Mandar tidak hanya mengenal pemberian *passorong* saja tetapi juga mengenal pemberian mahar yang menjadi syarat dalam perkawinan Islam. Artinya, masyarakat Mandar mengenal secara pasti apa yang menjadi kewajiban agama dan yang menjadi kewajiban adat. Hingga kemudian, ketika keduanya bisa seiring sejalan maka persoalan bisa teratasi.

Adapun landasan hukum tentang mahar dalam agama Islam sangat jelas. Dalam Al Qur'an surah al-Nisa/4: 4 disebutkan:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan¹⁰. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati. Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

⁹Dalam pembahasan historis-antropologis, Nizar Abazhah membahasnya dalam *Fi Madinah al-Rasul*, yang diterjemahkan secara bagus oleh Asy'ari Khatib, dan diterbitkan dengan judul *Ketika Nabi di Kota: Kisah Seharian Nabi di Kota*, (Jakarta: Zaman, 2010)

¹⁰ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Hadits Rasulullah tentang mahar diantaranya seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam shahihnya dalam hadits Sahl bin Sa'ad r.a ketika seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Rasulullah saw. Namun beliau tidak menginginkan wanita tersebut, hingga seorang sahabat menawarkan diri untuk menikahnya Rasulullah kemudian bertanya, yang artinya:

"Apakah engkau punya sesuatu untuk dijadikan mahar?" "Tidak demi Allah" jawabnya. "Pergilah kekeluargammu, lihatlah apakah mungkin engkau mendapatkan sesuatu." Kata Rasulullah. "Demi Allah saya tidak mendapatkan sesuatu" ujarinya. Rasulullah kemudian bersabda " Lihatlah lagi dan carilah walaupun hanya berupa cincin besi," Kemudian laki-laki itu pergi lagi kemudian beberapa lama ia kembali, " Demi Allah wahai Rasulullah, Saya tidak menemukan walaupun cincin dari besi, tapi ini izar (sarung) Saya. Kata Rasulullah "apa yang dapat engkau perbuat dengan sarungmu? Jika engkau memakainya maka tidak ada sama sekali yang engkau berikan untuk istrimu dan jika ia memakainya maka tidak ada sama sekali izar untukmu". Maka laki-laki pun duduk, dan tatkala ia telah lama duduknya ia bangkit. Rasulullah melihatnya berbalik pergi, maka ia memerintahkan seseorang untuk memanggil laki-laki tersebut. Rasulullah saw. Bertanya "apa yang engkau hafal dari Al Qur'an?" "Saya hafal surah ini dan itu" Jawabnya. "Benar-benar engkau menghafalnya di dalam hatimu?" tegas Rasulullah. "Iya" Jawabnya. "Bila demikian, pergilah, sungguh aku telah menikahkan engkau dengan mahar surah al-Qur'an yang telah engkau hafal". Kata Rasulullah.¹¹

Adapun tentang pesyaratan yang menjadi kebolehan suatu *Al Urf* yang dijelaskan oleh ulama yang memperbolehkan *al-'Urf* sebagai sumber Hukum Islam, yaitu:¹² *Al-'Urf* berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakukannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, *Al-'Urf* sudah ada sebelum munculnya kasus yang akan ditetapkan hukumnya. *Al-'Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu aqad (transaksi). *Al-'Urf* tidak bertentangan dengan nash peneliti menyimpulkan tidak akan ditemukannya

¹¹HR Bukhari Muslim

¹²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 144. Lihat juga Muhamed el-Awa, *The Place Of Custom (Urf) In Islamic Legal Theory*, hal. 181-182

secara jelas akan dasar boleh tidaknya tradisi *passorong* tersebut dilestarikan sebagai *al Urf Shahih*.

Hanya saja penulis mengacu pada sebuah kaedah fiqhiyyah yang menjelaskan bahwa segala hukum yang tidak ada dasar hukumnya akan mengacu pada penetapan awal yaitu asas "boleh" selama tidak ada dalil hukum yang megharamkannya, maka ini semakin menjadi dalil kuat tentang pelaksanaan tradisi *passorong* boleh-boleh saja dilestarikan.

Permasalahan kemudian muncul dalam persoalan nominal yang ada. Masyarakat Mandar meskipun tidak mayakini *passorong* sebagai kewajiban *syar'i* tetapi sebahagian besar menganggap itu sebuah kewajinban adat. Dimana di lain pihak, laki-laki banyak yang merasa terbebani dengan nominalnya yang semakin tinggi. Adat ini memicu paradigma tersendiri bagi masyarakat sehingga menimbulkan persepsi orang bahwa masyarakat Mandar adalah masyarakat yang melakukan penjualan terhadap anak perempuannya dan ini bisa kita tarik kepada hal yang bisa mengklaim sebuah pelecehan perempuan dan sangat bertentang dengan misi agama Islam yaitu memuliakan derajat manusia dan menghormati perempuan.

Hal kedua dari nominal *passorong* itu sendiri adalah adanya perkawinan yang boros dan menghambur-hamburkan uang. Bisa dikata ini juga bertentangan dengan ajaran Islam dimana islam mengajurkan sesederhana mungkin dalam segala hal dan jangan berlebih-lebihan.

Akan tetapi semua dalil tentang dalil tersebut yang menggiring tradisi ini menjadi *Al Urf al Fasid* terbantahkan dari beberapa argument yang penulis dapatkan dari hasil wawancara. Contoh beberapa diantaranya argument tentang nominal yang

tinggi sebagai suatu praktek penjualan perempuan sama sekali tidak benar karena keseluruhan rangkaian acara *passorong* berdiri diatas asas musyawarah yang juga merupakan asas dari agama Islam

وشاورهم في الامر

Artinya:

"Bermusyawarahlah kalian dalam urusan kalian"

Al Urf Shalih tentunya juga merupakan sebuah adat yang sudah mengalami transformasi dalam sebuah masyarakat. Seperti halnya dengan *passorong* ini mengalami transformasi dari masa-kemasa. Selama hal itu wajar dan tidak keluar dari koridor maka sah-sah saja kita menerima adat tersebut dan tidak membenturkannya dengan agama. Dan walaupun keluar dari koridor sehingga dianggap menyalahi agama, maka di sini, penulis beranggapan bahwa tugas para ulama berperan penting untuk mensejajarkannya. *Al Urf Fasid* bisa menjadi *Al Urf Shalih* dan diterima di masyarakat ketika diseuaikan dengan agama. Begitupun sebaliknya. Pengetahuan seorang ulama sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah fondasi hukum Islam agar sesuai dengan tuntutan *zaman* dan *makan*. Agar tercipta agama yang pada dasarnya memberi rahmat bagi seluruh alam.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Bertolak dari uraian yang ada dalam skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Passorong* merupakan salah satu tradisi yang sudah ada dalam perkawinan adat Mandar di Kabupaten POLMAN sebelum masuknya Islam. *Passorong* dikenal pada awalnya sebagai pemberian dalam bentuk upeti; emas perak dan semacamnya dengan tujuan biaya perkawinan tetapi seiring berjalannya waktu maka sekarang memakai uang real atau rupiah yang dibebankan untuk keluarga mempelai laki-laki dan diberikan kepada keluarga mempelai perempuan dengan tujuan bukan hanya biaya perkawinan tetapi juga terkadang ada motif lain seperti menjadi modal awal. Dalam pemberiannya ada dua macam. Ada secara kontan dan ada juga yang diangsur. Terkadang juga ada yang menambahkan tanah atau sawah dan lain-lain. Waktu pemberiannya ada tiga, pada saat *mapparai doi*, pada saat acara *siala* (akad nikah) dan ada juga yang setelahnya tetapi ini sangat jarang. Nominalnya relatif tergantung kesepakatan kedua keluarga dengan mempertimbangkan besaran acara yang akan dilaksanakan. Selain itu mempertimbangkan juga strata social yang ingin dinikahi. Dari sudut pandang sosial budaya, *passorong* masih tetap digunakan pada pernikahan Mandar di Kabupaten POLMAN dengan prinsip-prinsip bahwa melalui tradisi tersebut seseorang dapat

mempertahankan dan menunjukkan status sosialnya kepada khalayak dengan mengerahkan segala kemampuan baik materil maupun non-materil. Hal tersebut sebagai perwujudan kesanggupan, kesiapan, keseriusan dan kehendak untuk menjadi anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Dan juga sebagai cara untuk mengangkat harkat, dan martabat atau harga diri. Beberapa motif yang melatar belakangi tingginya jumlah nominal *passorong* dikalangan masyarakat Mandar di Kabupaten POLMAN adalah sebagai motif ekonomi. Untuk menjalin sebuah ikatan kekeluargaan agar bisa lebih baik kedepannya dalam soal ekonomi. Juga ada motif politik. Untuk menjaling hubungan dengan orang-orang tertentu dan menjadikannya setara dengan besaran *passorong* yang diberikan. Dan juga ada motif penolakan secara halus. Dengan meninggikan *passorong* di luar batas kemampuan sang pelamar. Ada beberapa dampak yang terjadi dalam masyarakat Mandar di Kabupaten POLMAN dari mahalnnya *passorong*. Ada yang mengacu kepada individu, keluarga dan ada juga yang mengacu kepada masyarakat. Dampak secara individu diantaranya menjadikan seseorang lebih bertanggung jawab, menjadi pekerja keras tetapi juga menyebabkan banyaknya perempuan yang tidak menikah hingga tua. Dari segi keluarga, tingginya *dui menre* mengangkat martabat kedua belah pihak dan menjadikan keluarga baru yang akan dijalani oleh kedua mempelai merasa bertanggung jawab besar atas bahtera kehidupan rumah tangganya. Dampak di masyarakat, minimnya tingkat perceraian diantara orang Bugis dan juga sebagai ajan silaturrahi ketika perkawinan tersebut meriah. Tetapi juga punya dampak negatif ketika *passorong*

mahal. Beberapa diantara pelaku kawin lari karena mahal nya *passorong*. Meskipun *passorong* sebagai tradisi yang diterima di masyarakat secara umum, namun diantara mereka juga ada yang tidak melaksanakannya karena kemampuan ekonomi yang tidak memungkinkan serta tingkat pendidikan masyarakat yang menganggap kurang rasional dan ingin ditinggalkan.

2. Tinjauan Hukum Islam dengan mengajukan kajian *al Urf* dalam prakteknya, *passorong* dapat dikategorikan sebagai *Al Urf As Shalih* karena tidak adanya hal yang bertentangan dengan syariat. Hal yang dianggap bertentangan seperti mahal nya serta banyaknya dampak negatif yang disebabkan terbantahkan dengan adanya negosiasi awal dalam masyarakat Mandar yang membahas tentang besaran yang sesuai kemampuan kedua belah pihak. Adapun dampak negatif yang diklaim ternyata tidak semuanya disebabkan oleh mahal nya *passorong* tetapi banyak factor yang lain seperti tidak mendapatkan restu dll. Sedangkan dalil tentang klaim melanggar syariat karena bertentangan dengan beberapa hadits seperti anjuran untuk sederhana dan mempermudah dalam urusan agama, juga terbantahkan dengan teori *al Urf* sendiri. Dimana hal tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk fleksibilitas dari Hukum Islam dan dikecualikan dalam tataran adat. Untuk urusan *nominal* yang tinggi juga dibantah oleh beberapa data lapangan yang menjelaskan bahwa mahal tidaknya sesuatu itu relatif dan untuk urusan *passorong* mempunyai solusi dalam hal nominal yaitu dengan cara negosiasi dalam musyawarah *passorong*.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan yang telah penulis paparkan mengenai *passorong* dalam perkawinan adat Mandar di Kabupaten POLMAN Sulawesi Barat maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diperlukan suatu kerjasama antara seluruh lapisan masyarakat untuk melestarikan budaya serta berusaha untuk memberikan pemahaman yang tepat akan segala hal yang dianggap bertentangan antara adat dan agama atau hal yang lainnya. Pemahaman yang baik akan menjadi sebuah pondasi yang kokoh untuk menghilangkan segala dampak negatif. Menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan beribu adat dan budaya yang patut dilestarikan.
2. Diadakannya penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan kajian adat dan budaya yang menggunakan pisau analisa hukum islam. *Fiqh*, *Ushul fiqh*, *Maqashid Syariah* dan lain-lain. Urgensi pengetahuan sosial antropologi dalam tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dituntut adanya banyak penelitian dalam bidang tersebut yang menggunakan nalar agama agar pandangan tentang agama tidak menjadi rigid dan bisa diterima di setiap tempat dan waktu hingga melahirkan agama Islam sebagai *rahmatan lilalamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujid, M. dkk. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- A Fyzee, Asaf A. *Outlines of Muhammad Law*. Terj. Arifin Boy. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Tirta Mas, 1965.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*..
- Arif Subyantoro dan fx Suwanto. *Metode dan Tehnik Penelitian Social* .Yogyakarta: Andi, 2006.
- Ash-Shiddieqi, Hasbi. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* .Jakarta: Departemen Agama RI, 1989.
- BPS Kab. Polman (*Polman In Figures*), 2007.
- Dalam pembahasan historis-antropologis, Nizar Abazhah membahasnya dalam *Fi Madinah al-Rasul*, yang diterjemahkan secara bagus oleh Asy'ari Khatib, dan diterbitkan dengan judul *Ketika Nabi di Kota: Kisah Seharian Nabi di Kota*, Jakarta: Zaman, 2010.
- Dewi Wulansari, C. *Hukum Adat Indonesia; Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Hilman Hadikusuma *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung, Alumni Press: 1983.
- HR Bukhari Muslim.
- Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Koncaraningrat. *Metode Antropologi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1958.
- Lihat *Kamus Istilah Fiqh*, h. 184.
- Lihat Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (t.th.).
- Muhammad, Bushar. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Prandja Paramita, t.th.
- Muhktar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 144. Lihat juga Muhamed el-Awa, *The Place Of Custom (Urf) In Islamic Legal Theory* Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang Angkasa Raya, 1993.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.

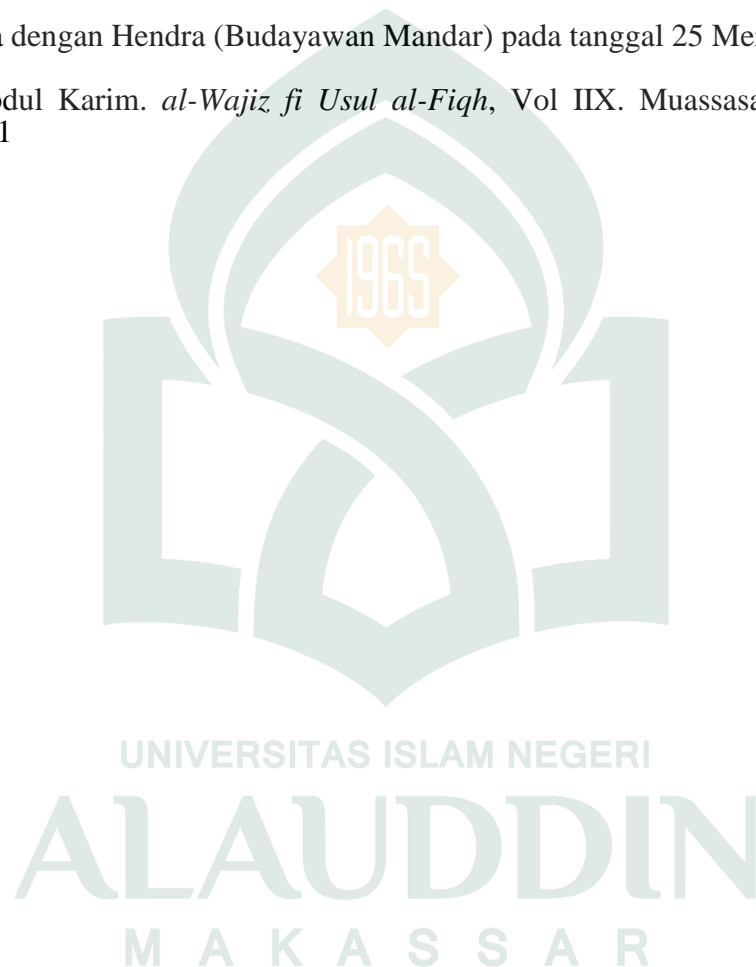
Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat* .Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Wawancara dengan KH. Bisri (Tokoh dan Ketua MUI POLMAN) pada tanggal 27 Mei 2014.

Wawancara dengan Abd. Rahman (Staf KUA Balanipa) Pada tanggal 28 Mei 2014.

Wawancara dengan Hendra (Budayawan Mandar) pada tanggal 25 Mei 2014.

Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, Vol IIX. Muassasah ar- Rusalah, 2011



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **Ahmad. Darwis**, Lahir di Sawang pada tanggal 5 Juni 1989, tempat tinggal di Sabang Subik, Kelurahan Sabang Subik Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. Dan anak kelima dari dua belas bersaudara pasangan **Darwis** dan **Dahari**. Penulis menempuh jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan SD Negeri 007 Sabang Subik (1996-2002), kemudian melanjutkan pendidikan di Mts Nuhiah Pambusuang (2002-2005). Setelah itu penulis lanjut di SMA Negeri 1 Tinambung (2006-2009), lalu berlabuh di kampus peradaban dan lulus pada jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar (2009-2015). Selama di kampus penulis pernah menjadi pengurus HMJ Peradilan Agama periode (2011-2012).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R